E-ISSN: 3025-0994
Halaman 5571-5579
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Efektivitas Tata Kelola Aset Barang Milik Daerah Pada Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari

Pandu Gusti Muktisani[1], Akif Yanuar Rifqi[2], Farage Alena[3], Deby Febrian Eprilianto[4], Revienda Anita Fitrie[5]

[1] Department of Public Administration, State University of Surabaya
[2] Department of Public Administration, State University of Surabaya
[3] Department of Public Administration, State University of Surabaya
[4] State University of Surabaya
[5] State University of Surabaya
e-mail:[1] 24040674306@mhs.unesa.ac.id, [2]24040674308@mhs.unesa.ac.id, [3]24040674311@mhs.unesa.ac.id, [4]debyeprilianto@unesa.ac.id, [5]reviendafitrie@unesa.ac.id

Abstrak

Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kelurahan. Pengelolaan aset yang efektif tidak hanya ditentukan oleh tersedianya pencatatan inventaris, tetapi juga oleh kesesuaian perencanaan kebutuhan, ketepatan pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengawasan aset. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas tata kelola aset barang milik daerah pada Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, dengan memperhatikan aspek inventarisasi dan perencanaan kebutuhan barang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak kelurahan dan dokumentasi berupa Kartu Inventaris Barang (KIB) intrakomptabel serta ekstrakomptabel. Data dianalisis dengan menghubungkan informasi hasil wawancara dan dokumen inventaris untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan tata kelola aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan Ploso telah memiliki pencatatan aset melalui KIB yang memuat informasi mengenai nama barang, tahun pengadaan, jumlah, dan nilai aset. Dokumen tersebut menunjukkan adanya upaya administrasi inventarisasi aset. Namun, pada aspek perencanaan dan pengadaan masih ditemukan kendala, yaitu usulan kebutuhan barang melalui sistem Elektronik Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (ERKBD) yang belum terealisasi sejak tahun 2023 hingga waktu wawancara. Pihak kelurahan juga menyampaikan belum memperoleh informasi yang jelas mengenai alasan penundaan usulan tersebut. Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara perencanaan kebutuhan dan realisasi pengadaan. Dengan demikian, tata kelola aset di Kelurahan Ploso telah didukung pencatatan inventaris, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam kepastian realisasi pengadaan, koordinasi, dan keterbukaan informasi mengenai status usulan kebutuhan barang.

Kata Kunci: Efektivitas; Tata Kelola Aset; Barang Milik Daerah; Inventarisasi; Kelurahan Ploso.

Abstract

The management of regional government assets plays an important role in supporting local government administration and public services at the urban village level. Effective asset management is not only determined by the availability of inventory records but also by appropriate needs planning, procurement, utilization, maintenance, and asset supervision. This study aims to analyze the effectiveness of regional government asset management in Ploso Urban Village, Tambaksari District, focusing on asset inventory and the planning of goods requirements. This study employs a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews with urban village officials and documentation in the form of intracomptabel and extracomptabel Inventory Cards (Kartu Inventaris Barang/KIB). The data were analyzed by relating interview information to inventory documents to describe the implementation of asset management. The findings indicate that Ploso Urban Village has maintained asset records through KIB documents containing information on item names, procurement years, quantities, and asset values. These documents demonstrate administrative efforts in asset inventory management. However, challenges remain in the planning and procurement processes. Proposals for asset requirements submitted through the Electronic Regional Government Asset Needs Planning System (ERKBD) have reportedly remained unrealized since 2023 up to the time of the interview. Urban village officials also stated that they had not received clear information regarding the reasons for these delays. This finding indicates a gap between asset needs planning and procurement realization. Therefore, although asset management in Ploso Urban Village is supported by inventory records, its effectiveness still needs improvement, particularly in ensuring procurement realization, strengthening coordination, and increasing transparency regarding the status of submitted asset requirements.

Keywords: Effectiveness; Asset Management; Regional Government Assets; Inventory; Ploso Urban Village.

LATAR BELAKANG

Aset daerah merupakan salah satu sumber daya penting yang dimiliki pemerintah untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Keberadaan aset, seperti tanah, gedung, peralatan, dan perlengkapan kantor, memiliki peran dalam mendukung kelancaran kegiatan administrasi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan aset daerah perlu dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, dan bertanggung jawab agar aset yang dimiliki dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan organisasi pemerintahan. Aituarauw (2021) menjelaskan bahwa pengelolaan aset daerah berkaitan dengan upaya menghasilkan informasi aset yang dapat dipertanggungjawabkan serta pelaksanaan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan.

Pengelolaan aset tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan dan pencatatan barang, tetapi juga mencakup proses perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, hingga pengawasan aset.

Efektivitas dalam tata kelola aset dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan pengelolaan aset melalui pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan aset dapat dikatakan efektif apabila proses perencanaan berjalan sesuai kebutuhan, pencatatan inventaris dilakukan secara tertib, pengadaan dapat direalisasikan, serta aset yang tersedia mampu menunjang kegiatan organisasi. Penelitian Kahfi et al. (2023) menunjukkan bahwa inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan memiliki pengaruh positif terhadap pengamanan aset daerah. Hal tersebut memperlihatkan bahwa administrasi inventarisasi merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pengelolaan aset pemerintah daerah.

Kelurahan sebagai bagian dari organisasi pemerintahan daerah juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola barang milik daerah yang digunakan untuk menunjang aktivitas pelayanan dan administrasi. Salah satu bentuk pelaksanaan pengelolaan tersebut dapat dilihat melalui pencatatan aset dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Tumilantouw et al. (2024) menjelaskan bahwa inventarisasi barang milik daerah merupakan kegiatan pengumpulan data, pencatatan, dan pelaporan untuk mendukung tertib administrasi serta pengelolaan aset. Sejalan dengan hal tersebut, Allo et al. (2024) menekankan pentingnya pelaksanaan prosedur inventarisasi berdasarkan ketentuan yang berlaku agar data barang milik daerah dapat dikelola secara tertib.

Berdasarkan dokumen KIB Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, tercatat sebanyak 113 entri aset intrakomptabel dengan nilai perolehan sebesar Rp401.588.580,91 dan 55 entri aset ekstrakomptabel dengan nilai sebesar Rp13.112.474,98. Dengan demikian, kedua dokumen tersebut memuat total 168 entri dengan nilai perolehan tercatat sebesar Rp414.701.055,89. Data tersebut menunjukkan bahwa Kelurahan Ploso telah memiliki administrasi pencatatan inventaris sebagai bagian dari pelaksanaan tata kelola aset daerah.

Meskipun demikian, keberadaan dokumen inventaris belum sepenuhnya menggambarkan efektivitas pengelolaan aset secara menyeluruh. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan dan realisasi kebutuhan barang. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kelurahan Ploso, pengajuan kebutuhan barang dilakukan setiap tahun melalui sistem Elektronik Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (ERKBD). Usulan kebutuhan yang diajukan pada suatu tahun direncanakan untuk direalisasikan pada tahun berikutnya. Namun, berdasarkan keterangan narasumber, sejumlah usulan yang telah diajukan sejak tahun 2023 belum terealisasi hingga wawancara dilakukan. Pihak kelurahan juga menyampaikan bahwa belum terdapat informasi yang jelas mengenai alasan penundaan maupun status realisasi usulan tersebut.

Permasalahan tersebut penting untuk dikaji karena keterlambatan realisasi kebutuhan aset berpotensi memengaruhi pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan. Selain itu, belum jelasnya informasi mengenai status usulan kebutuhan dapat menjadi kendala dalam koordinasi antara pihak kelurahan dengan pihak yang berwenang dalam proses pengadaan barang milik daerah. Penelitian Sari et al. (2023) menunjukkan bahwa pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan

barang milik daerah masih dapat menghadapi hambatan administratif sehingga diperlukan upaya optimalisasi pengelolaan aset. Dengan demikian, efektivitas tata kelola aset tidak cukup dinilai berdasarkan kelengkapan pencatatan inventaris, tetapi juga perlu memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan organisasi, proses perencanaan, dan realisasi pengadaan aset.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis efektivitas tata kelola aset barang milik daerah pada Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari. Analisis dilakukan dengan memperhatikan dokumen inventaris aset serta informasi mengenai proses pengajuan dan realisasi kebutuhan barang melalui sistem ERKBD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas tata kelola aset barang milik daerah di Kelurahan Ploso serta mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam perencanaan kebutuhan, realisasi pengadaan, koordinasi, dan keterbukaan informasi.

TIPE ARTIKEL

Artikel ini merupakan artikel asli hasil penelitian yang membahas efektivitas tata kelola aset barang milik daerah pada Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data hasil wawancara dan dokumentasi sebagai sumber informasi utama. Data dokumentasi diperoleh melalui Kartu Inventaris Barang (KIB) intrakomptabel dan ekstrakomptabel, sedangkan data wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai proses perencanaan kebutuhan serta realisasi pengadaan barang milik daerah. Pembahasan dalam artikel difokuskan pada pelaksanaan inventarisasi aset dan kendala dalam proses perencanaan serta pengadaan barang. Artikel ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas tata kelola aset di tingkat kelurahan berdasarkan kondisi dan data yang ditemukan di lapangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai efektivitas tata kelola aset barang milik daerah pada Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan inventarisasi aset serta proses perencanaan dan realisasi kebutuhan barang milik daerah. Melalui pendekatan tersebut, penelitian berupaya menggambarkan kondisi pengelolaan aset berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak kelurahan dan dokumen inventaris yang tersedia.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pihak Kelurahan Ploso untuk memperoleh informasi mengenai proses pengajuan kebutuhan barang, pelaksanaan perencanaan, serta kendala yang dihadapi dalam realisasi pengadaan aset. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen Kartu Inventaris Barang (KIB) intrakomptabel dan ekstrakomptabel milik Kelurahan Ploso. Kedua dokumen tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai jenis barang, tahun perolehan, jumlah, dan nilai aset yang tercatat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data hasil wawancara sebagai sumber informasi mengenai pelaksanaan pengelolaan aset dan data dokumentasi sebagai sumber informasi mengenai pencatatan inventaris barang milik daerah. Data yang terkumpul

kemudian dianalisis secara deskriptif melalui tahapan pengelompokan informasi berdasarkan fokus penelitian, penyajian data dalam bentuk uraian dan rekapitulasi inventaris, serta penarikan kesimpulan. Hasil wawancara dibandingkan dengan informasi dalam dokumen KIB untuk memperoleh gambaran mengenai kesesuaian antara pencatatan aset dan pelaksanaan perencanaan kebutuhan barang. Analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menilai efektivitas tata kelola aset dengan memperhatikan aspek inventarisasi, perencanaan, dan realisasi pengadaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan dokumentasi Kartu Inventaris Barang (KIB) Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, diketahui bahwa pencatatan aset daerah telah dilakukan melalui dua kelompok inventaris, yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel. Dokumen KIB intrakomptabel memuat sebanyak 113 entri dengan nilai perolehan tercatat sebesar Rp401.588.580,91. Sementara itu, dokumen KIB ekstrakomptabel memuat sebanyak 55 entri dengan nilai perolehan sebesar Rp13.112.474,98. Dengan demikian, kedua dokumen tersebut mencatat total 168 entri dengan nilai perolehan keseluruhan sebesar Rp414.701.055,89.

Dokumen inventaris tersebut memuat informasi mengenai barang, tahun perolehan, jumlah, serta nilai aset. Keberadaan dokumen KIB menunjukkan bahwa Kelurahan Ploso telah memiliki pencatatan administratif terhadap barang milik daerah yang digunakan untuk menunjang kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Pencatatan melalui dua kelompok inventaris tersebut menjadi salah satu bentuk pelaksanaan administrasi pengelolaan aset di tingkat kelurahan.

Selain pencatatan inventaris, hasil wawancara menunjukkan bahwa proses perencanaan kebutuhan barang di Kelurahan Ploso dilakukan melalui sistem Elektronik Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (ERKBD). Pengajuan kebutuhan barang dilakukan setiap tahun dan usulan yang disampaikan pada tahun tertentu direncanakan untuk direalisasikan pada tahun berikutnya. Namun, berdasarkan keterangan pihak kelurahan, terdapat sejumlah usulan kebutuhan barang yang telah diajukan sejak tahun 2023 tetapi belum terealisasi hingga wawancara dilakukan. Pihak kelurahan juga menyampaikan bahwa belum memperoleh informasi yang jelas mengenai alasan penundaan maupun perkembangan status usulan tersebut. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa selain aspek pencatatan inventaris, terdapat persoalan dalam proses perencanaan dan realisasi kebutuhan barang. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya pelaksanaan administrasi inventarisasi aset, tetapi masih terdapat kendala dalam pemenuhan kebutuhan barang yang telah diajukan.

Tabel 1. Rekapitulasi Inventaris Barang Milik Daerah Kelurahan Ploso

No.	Jenis Inventaris	Jumlah Entri	Nilai perolehan
1.	Intrakomptabel	113	Rp 401.588.580.91
2.	Ekstrakomptabel	55	Rp 13.112.474.98
	Total	**168**	**Rp 414.701.055.89**

Berdasarkan data Kartu Inventaris Barang (KIB), pencatatan aset Kelurahan Ploso dikelompokkan ke dalam inventaris intrakomptabel dan ekstrakomptabel. Rekapitulasi kedua kelompok inventaris tersebut disajikan pada Tabel 1. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat 168 entri inventaris dengan nilai perolehan tercatat sebesar Rp414.701.055,89.

PEMBAHASAN

Pencatatan aset melalui Kartu Inventaris Barang (KIB) merupakan bagian penting dalam tata kelola barang milik daerah. Berdasarkan hasil penelitian, Kelurahan Ploso telah memiliki dokumen inventaris yang memuat informasi mengenai jenis barang, tahun perolehan, jumlah, dan nilai aset. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk melaksanakan penatausahaan aset secara administratif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Tumilantouw et al. (2024) yang menjelaskan bahwa inventarisasi berperan dalam mendukung tertib administrasi dan pengelolaan barang milik daerah. Allo et al. (2024) juga menekankan pentingnya prosedur inventarisasi yang sesuai dengan ketentuan agar pencatatan aset dapat dilaksanakan secara tertib.

Meskipun demikian, efektivitas tata kelola aset tidak dapat dinilai hanya berdasarkan jumlah aset yang tercatat atau besarnya nilai perolehan. Pencatatan inventaris perlu didukung oleh pengelolaan yang berkelanjutan, termasuk kesesuaian antara kebutuhan organisasi dan ketersediaan barang. Penelitian Kahfi et al. (2023) memperlihatkan bahwa inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan berkaitan dengan pengamanan aset daerah. Oleh karena itu, keberadaan dokumen KIB merupakan salah satu indikator pelaksanaan administrasi aset, tetapi belum cukup untuk menyatakan bahwa seluruh proses pengelolaan aset telah berjalan efektif.

Permasalahan yang lebih terlihat dalam penelitian ini terdapat pada proses perencanaan dan realisasi pengadaan barang melalui sistem ERKBD. Adanya usulan kebutuhan barang yang belum terealisasi sejak tahun 2023 menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pengadaannya. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan administrasi serta pelayanan publik di Kelurahan Ploso. Penelitian Aituarauw (2021) menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan aset perlu dilihat dari kesesuaian pelaksanaan pengelolaan dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, keberhasilan pencatatan aset perlu diikuti dengan proses perencanaan dan pengadaan yang mampu memenuhi kebutuhan organisasi.

Jika ditinjau dari perspektif Good Governance, kondisi tersebut berkaitan dengan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip efektivitas dan efisiensi menekankan pentingnya kesesuaian antara perencanaan kebutuhan dengan hasil yang dicapai. Sementara itu, transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai proses dan perkembangan pengadaan aset. Yuniar dan Firmansyah (2023) mengkaji transparansi pemerintah daerah dan menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi dalam tata kelola pemerintahan. Adapun akuntabilitas menuntut adanya kejelasan tanggung jawab dalam setiap tahapan pengelolaan barang milik daerah. Oleh sebab itu, penyampaian informasi mengenai status usulan serta koordinasi antara pihak kelurahan dan pihak yang berwenang menjadi hal penting untuk mendukung tata kelola aset yang lebih baik.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, efektivitas tata kelola aset barang milik daerah pada Kelurahan Ploso telah didukung oleh pelaksanaan pencatatan inventaris, tetapi masih menghadapi kendala pada aspek perencanaan dan realisasi pengadaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset perlu dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari tertibnya administrasi pencatatan, tetapi juga dari kemampuan proses pengelolaan dalam memenuhi kebutuhan organisasi. Peningkatan koordinasi, kejelasan informasi, serta evaluasi terhadap usulan kebutuhan barang diperlukan agar pengelolaan aset dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

SIMPULAN

Tata kelola aset barang milik daerah pada Kelurahan Ploso telah didukung oleh pencatatan inventaris melalui KIB intrakomptabel dan ekstrakomptabel. Namun, efektivitasnya masih menghadapi kendala dalam realisasi pengadaan kebutuhan barang yang telah diajukan melalui ERKBD. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi dan keterbukaan informasi mengenai status usulan pengadaan. Pihak terkait diharapkan melakukan evaluasi perencanaan kebutuhan serta memastikan proses pengadaan berjalan lebih transparan, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

Aituarauw, I. F. A. (2021). Efektifitas pengelolaan aset daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, 1*(2), 99–110. https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i2.1998

Allo, R. L., Walandouw, S. K., & Datu, C. (2024). Analisis prosedur inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 (Studi kasus Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara). *Riset Akuntansi dan Manajemen Pragmatis, 2*(2), 256–269. https://doi.org/10.58784/ramp.229

Astuti, R., & Museliza, V. (2024). Analisis penatausahaan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir. *Publicness: Journal of Public Administration Studies, 3*(2), 144–154. https://doi.org/10.24036/publicness.v3i2.185

Dahlan, F. A. (2024). Evaluasi penatausahaan barang milik daerah (BMD) berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, 8*(1).

Daulay, N. A. E., Azzhara, F., Putranta, J., Allim, S., & Lubis, P. K. D. (2024). Penyelesaian permasalahan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD). *Innovative: Journal of Social Science Research, 4*(2), 1551–1557. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9610

Kahfi, Z., Safitri, A. S. I., Nurhasanah, A., & Azhari, S. R. I. (2023). Pengaruh pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap pengamanan aset daerah Pemerintah Kota Makassar. *YUME: Journal of Management, 6*(1), 323–335. https://doi.org/10.37531/yum.v6i1.3654

Londa, J. J., & Kapojos, P. (2023). Analisis penatausahaan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 pada Dinas Kesehatan Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, 8*(1).

Lucas, K. Z. L. R., Afandi, D., & Kapojos, P. M. (2025). Evaluasi penatausahaan barang milik daerah berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 3*(1), 43–51. https://doi.org/10.58784/rapi.271

Lumingkewas, H. S., Saerang, D. P. E., & Datu, C. (2025). Analisis prosedur inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 3*(1), 316–324. https://doi.org/10.58784/rapi.327

Manane, D. R., Kase, M. S., Redjo, P. R. D., & Manek, A. (2023). Manajemen pengelolaan aset daerah (Studi kasus Kabupaten TTU). *Jurnal Ilmiah Ekonomi, 5*(4). https://doi.org/10.32938/ie.v5i4.5738

Matakena, P. J., Kusworo, & Madjid, U. (2021). Analisis pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai Provinsi Papua. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia, 13*(2).

Minabari, F., Sabijono, H., & Kindangen, W. D. (2025). Analisis penatausahaan barang milik daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 di Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 13*(1). https://doi.org/10.35794/emba.v13i01.59522

Nadia, L., & Budiarto, D. S. (2021). Pentingnya sistem informasi untuk pengelolaan barang milik daerah. *Akuntabel: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 18*(2), 295–302.

Nasution, D. A. D., Supraja, G., & Damanik, A. F. (2022). Pengukuran efektivitas pengelolaan barang milik daerah dalam Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang. *Warta Dharmawangsa, 16*(3). https://doi.org/10.46576/wdw.v16i3.2252

Periansya, P., Sari, Y., & Azmi, F. (2022). Manajemen Barang Milik Daerah dan optimalisasi pengelolaan aset Provinsi X. *E-Jurnal Akuntansi, 32*(10), 3081–3097. https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i10.p13

Rahayu, S. (2021). Optimalisasi pengelolaan aset daerah di Pemerintah Kabupaten Lebak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 11*(1), 29–37. https://doi.org/10.33592/jiia.v11i1.1420

Rakhmawati, I. (2023). Evaluation of the local management information system application—goods of local government (SIMDA BMD). *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma, 22*(2), 310–326. https://doi.org/10.29303/aksioma.v22i2.266

Sari, D. N., Mutiara, N., Askafi, E., & Muyaningtiyas, R. D. (2023). Optimalisasi pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah dalam rangka pengelolaan aset tetap pada BPKAD Kabupaten Blitar. *Revitalisasi: Jurnal Ilmu Manajemen, 12*(2), 491–506. https://doi.org/10.32503/revitalisasi.v12i2.4674

Sondakh, V. L., Wokas, H. R. N., & Latjandu, L. D. (2023). Evaluasi pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA, 11*(1). https://doi.org/10.35794/emba.v11i1.47136

Supriadi, A., Haryani, S., & Nurhardiyanto, I. (2023). Efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala. *Jurnal Kolaboratif Sains, 6*(11).

Tumilantouw, K. N. W., Tinangon, J. J., & Walandouw, S. K. (2024). Analisis penatausahaan inventarisasi barang milik daerah berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 pada Bapenda Kota Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 2*(2), 156–164. https://doi.org/10.58784/rapi.149

Wahyuni, S., Diartika, F., Nugraha, C. B., & Lubis, F. R. A. (2021). Roadmap pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagai strategic of asset management dalam pedoman kebijakan aset daerah pada Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Aset dan Penilai, 1*(1). https://doi.org/10.56960/jmap.v1i1.12

Widyaningsih, A. (2022). Accountability for governance of local government fixed assets. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 13*(1), 180–194.

Yuniar, M. R., & Firmansyah, A. (2023). The transparency level of local governments in Indonesia: Does the level of financial health matter? *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 9*(1), 123–150. https://doi.org/10.28986/jtaken.v9i1.1195